

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa periode terakhir, ekonomi Indonesia telah berkembang dengan cepat menunjukkan ketahanan yang cukup besar di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik. Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh 1% s.d 2% setiap tahun hingga tahun 2025. Meskipun proyeksi ini mencerminkan kinerja ekonomi yang solid, kemiskinan tetap menjadi masalah utama yang mencerminkan ketidakmerataan tingkat kesejahteraan di kalangan penduduk (Aryeetey, 2015). Kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga mencerminkan rendahnya standar hidup, ketidakstabilan ekonomi, terbatasnya mobilitas sosial, serta berbagai masalah lingkungan yang menyertainya. Keadaan ini membawa konsekuensi jangka panjang dan berpotensi mempengaruhi kesejahteraan generasi yang akan datang. (Alshater et al., 2022).

**Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin (Persen %)
2020	27,55	10,91
2021	26,5	9,71
2022	26,36	9,57
2023	25,9	9,36
2024	24,05	8,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Meskipun ada peningkatan, tingkat kemiskinan di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir. Pandemi COVID-19 meningkatkan kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021. Tetapi tingkat kemiskinan turun menjadi 8,57% pada tahun 2024, atau setara dengan 24,06 juta orang, dengan target pemerintah menurunkan kemiskinan sebesar 0,5 s.d 0,8%

per tahun hingga nol pada tahun 2045. Namun, jutaan orang di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, meskipun angkanya terus menurun (World Bank, 2020). Menurut Laporan Prospek Kemiskinan Makro Bank Dunia, pada tahun 2024, sekitar 60,3% dari populasi atau 171,8 juta individu hidup dengan pendapatan dibawah US\$6,85 per hari, ambang batas negara berpendapatan menengah atas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah penurunan angka kemiskinan benar-benar menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi-kondisi ini telah mendorong pemerintah untuk memprioritaskan program-program pemberantasan kemiskinan (Ho & Iyke, 2018). Langkah penting yang diambil adalah memastikan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung seimbang dan inklusif. Menurut Romer (1990), investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, dan teknologi merupakan prasyarat utama untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, meskipun ekonomi Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ini belum mampu secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan (Affandi et al., 2017).

Perkembangan sektor keuangan, terutama melalui peningkatan investasi dan perluasan akses terhadap pembiayaan, memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah menetapkan penguatan sektor keuangan sebagai salah satu pilar utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), dengan target mengakhiri kemiskinan global pada tahun 2030 dan memperluas jangkauan layanan keuangan yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat (Espinosa et al., 2020). Pernyataan ini didukung oleh *World Bank* (2020) bahwa sektor keuangan memainkan peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih inklusif bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

Pengembangan sektor keuangan meningkatkan investasi dan produktivitas, sehingga berdampak positif pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Bank Dunia, 2016), dan mengurangi kemiskinan (Ben Naceur & Zhang, 2019). Berdasarkan teori *trickle-down*, perkembangan sektor keuangan, yang menjadi

pendorong pertumbuhan ekonomi, berpotensi untuk secara tidak langsung mengurangi tingkat kemiskinan, karena peningkatan aktivitas ekonomi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal serta berbagai peluang bisnis (Ho & Iyke, 2018).

Sektor keuangan memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, namun dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan masih tidak merata di seluruh Indonesia. Akses berkelanjutan terhadap layanan keuangan formal, terutama di daerah pedesaan, tetap menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dirasakan secara lebih luas. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNKI) 2024, tingkat inklusi dan literasi keuangan di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Daerah pedesaan, tingkat inklusi keuangan mencapai 70,13% dan literasi keuangan mencapai 59,25%, sementara di daerah perkotaan masing-masing inklusi keuangan mencapai 78,41% dan literasi keuangan mencapai 69,71%. Kesenjangan ini didukung juga oleh tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di pedesaan sebesar (11,34%) dibandingkan di perkotaan sebesar (6,66%). Kondisi ini menunjukkan urgensi dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan kebijakan yang memungkinkan setiap orang memperoleh akses layanan keuangan yang lebih baik. Langkah ini merupakan kunci untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sambil terus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Pada konteks tersebut, perkembangan teknologi berperan secara vital dalam memperluas jangkauan serta pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan di wilayah terpencil, mempercepat proses transaksi, dan memperkuat ekosistem keuangan di kawasan pedesaan. Dalam beberapa tahun terakhir, FinTech berkembang pesat sebagai alat utama untuk meningkatkan inklusi keuangan. FinTech berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan membantu mengurangi kemiskinan dengan memperkuat sektor keuangan, memperluas akses ke layanan keuangan, dan meningkatkan efisiensi sistem layanan tersebut. Oleh karena itu, terdapat potensi besar dalam penerapan FinTech

yang berperan dalam mempercepat realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Ehrentraud et al., 2020).

Sejak 2016, FinTech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat sejalan dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital di berbagai sektor. Pengembangan teknologi keuangan di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat dan bisnis mengakses dan mengelola keuangan mereka. FinTech mencakup berbagai layanan keuangan digital, termasuk platform pinjaman P2P *Lending* dan sistem pembayaran elektronik. Melalui platform ini, proses pinjam-meminjam dapat dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima pinjaman tanpa perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank (Abbasi et al., 2021). Melalui konektivitas digital, kedua pihak dapat berinteraksi secara online dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Melalui mekanisme ini, individu dan usaha yang belum terlayani dapat mengakses pembiayaan dengan suku bunga yang lebih terjangkau dari lembaga keuangan formal, termasuk UMKM dan komunitas di daerah terpencil (Guo et al., 2020).

Perkembangan FinTech di Indonesia, terutama pinjaman P2P *Lending*, didorong oleh pertumbuhan pesat di sektor keuangan melalui penggunaan internet, teknologi informasi, perangkat seluler, dan proses digitalisasi. Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah secara resmi mengesahkan 97 perusahaan penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi P2P *Lending*. Platform P2P *Lending* mencatat total penyaluran pinjaman sekitar Rp3 triliun pada 2018, Desember 2024 meningkat dengan pinjaman yang masih beredar sebesar Rp76 triliun. Sistem pembayaran digital di Indonesia berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan layanan P2P *Lending*. Sebagai metode pembayaran digital, uang elektronik memfasilitasi transfer dana ke bank atau penerbit melalui cara langsung maupun *e-banking*, dengan saldo yang tersedia untuk berbagai transaksi elektronik.

Selain, P2P *Lending* ada juga Uang Elektronik dimana Menurut Rivai et al. (2007), penggunaan uang elektronik di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018. Berbagai inovasi produk seperti Kartu debit, OVO, GoPay, kartu kredit, dan QRIS menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat penggunaan. Uang elektronik diharapkan dapat menyederhanakan dan

mempercepat aktivitas ekonomi, karena berfungsi sebagai alat pembayaran modern yang efisien, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital saat ini. Penggunaan uang elektronik di Indonesia diperkirakan mencapai Rp2,5 kuadriliun pada 2024, dengan total transaksi tercatat sebesar Rp22,67 miliar. Menurut data Bank Indonesia, angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan pesat penggunaan uang elektronik di Indonesia belakangan ini. Muncul pertanyaan penting, sejauh mana kemajuan FinTech efektif dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia?

Penelitian yang dilakukan di China menunjukkan bahwa memperluas akses ke layanan keuangan digital dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan dan mengurangi tingkat kemiskinan (Perera & Lee, 2013). Hasil penelitian memaparkan bahwa FinTech berpotensi besar sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses keuangan dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Peran ini semakin penting, terutama bagi komunitas di Indonesia yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal, sehingga FinTech dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan akses ke sumber pembiayaan yang lebih luas dan peluang ekonomi.

Sektor FinTech masih menghadapi risiko terlepas dari kemudahan pembiayaan. Tingkat gagal bayar P2P *Lending* tercatat sebesar 2,6 persen pada Desember 2024, dengan total pinjaman tidak lancar mencapai sekitar 2,2 triliun rupiah. Selain itu, lebih dari 33 ribu keluhan dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kebanyakan dari keluhan ini terkait pinjaman tidak resmi dan kesulitan membayar. FinTech ini merefleksikan lemahnya perlindungan konsumen serta adanya masalah regulasi, termasuk eksploitasi data, metode penagihan yang tidak sesuai etika, dan potensi terjatuh utang, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif bagi aspek ekonomi maupun sosial (Gunawan et al., 2022). Di Indonesia, transaksi uang elektronik naik 34,62% pada 2024, terutama untuk top-up saldo, pembayaran, dan transfer antar akun. Akumulasi unit perangkat yang tersebar hingga 887 juta. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Penggunaan uang elektronik telah berkembang pesat, namun masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu tantangan yang muncul adalah menurunnya volume transaksi setiap tahunnya,

disertai kecenderungan masyarakat menggunakan uang elektronik lebih sebagai sarana penyimpanan nilai daripada untuk transaksi konsumsi. Kendala utama dalam memanfaatkan uang elektronik secara optimal untuk pembayaran yang inklusif dan efisien adalah rendahnya akses internet di wilayah pedesaan dan tingkat literasi digital yang rendah. Oleh karena itu, sejauh mana FinTech mempengaruhi kemiskinan di Indonesia belum diketahui.

Penelitian ini menganalisis pengaruh FinTech terhadap kemiskinan di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor keuangan. Data BPS menunjukkan PDB Indonesia tumbuh rata-rata 5 s.d. 6% per tahun antara 2000–2019, sementara tingkat kemiskinan menurun dari 24% pada 1999 menjadi 8,57% pada 2024, atau sekitar 24,6 juta penduduk. Penelitian ini melengkapi literatur sebelumnya yang lebih fokus pada regulasi dan inklusi keuangan dengan menekankan dampak sosial-ekonomi fintech. Dalam menangkap perbedaan antarwilayah, studi ini menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia. Agar estimasi lebih valid dan mampu mengatasi masalah endogenitas serta variabel yang tidak terobservasi, penelitian ini menerapkan metode dinamis “*Generalized Method of Moments Instrumental Variables (IV-GMM)*” (Baltagi, 2005). Dimana memungkinkan analisis hubungan kausalitas secara lebih tepat dalam konteks data panel. Model dinamis memanfaatkan lag variabel dependen dan independen untuk memodelkan variabel ekonomi. Penggunaan lag variabel dependen dapat menimbulkan autokorelasi, sehingga estimasi OLS langsung berisiko bias.

Dalam penelitian ini, berbagai variabel kontrol digunakan sesuai literatur keuangan dan kemiskinan. Perkembangan sektor keuangan diukur melalui kredit domestik yang disalurkan bank ke sektor swasta, sedangkan pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan PDRB atas harga konstan 2010. Inflasi digunakan sebagai proksi kebijakan moneter, keterbukaan perdagangan dihitung dari total ekspor-impor sebagai persentase PDRB, dan jumlah pengguna telepon seluler mewakili akses teknologi digital sekaligus berfungsi sebagai variabel instrumen untuk indeks FinTech. Beberapa variabel dikonversi ke logaritma alami untuk menampilkan hasil perkiraan dalam bentuk elastisitas. **“Pengaruh FinTech Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh langsung FinTech terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Bagaimana FinTech mempengaruhi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
3. Bagaimana FinTech mempengaruhi kemiskinan melalui perkembangan keuangan.

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Tujuan penelitian ini dirumuskan berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:

1. Menganalisis pengaruh langsung FinTech terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh tidak langsung FinTech melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia
3. Menganalisis pengaruh tidak langsung FinTech melalui pengembangan keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung atau tidak langsung bagi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta memahami permasalahan nyata di masyarakat, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi diri dalam upaya menjadi ekonom di masa depan.

2. Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam merancang dan menyusun kebijakan inklusi keuangan digital yang tepat sasaran, mendorong pengembangan FinTech sebagai strategi kemiskinan, serta menjadi dasar penyusunan

program pemberdayaan ekonomi berbasis digital bagi masyarakat.

3. Bagi Kalangan Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu, terutama dalam bidang keuangan digital dan ekonomi pembangunan, sekaligus menjadi referensi bagi studi-studi terkait peran teknologi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis bagaimana (FinTech) mempengaruhi upaya kemiskinan di Indonesia. Data yang dikumpulkan dalam studi ini mencakup pinjaman P2P *Lending* di tingkat provinsi. Karena keterbatasan data, studi ini tidak dapat membedakan antara platform FinTech konvensional dan syariah. Tujuan studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan perkembangan FinTech dan kemiskinan pada tingkat makro. Tingkat mikro, seperti perilaku setiap pengguna secara individu, pembagian layanan berdasarkan jenis keuangan digital, tidak dibahas dalam penelitian ini.

